

Dr. Yayat Supriatna (Pakar Tata Ruang Univ Trisakti)

### **IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota, dan Tata Bangunan**

- Kebijakan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai IKN perlu mempertimbangkan dua isu penting yang harus mendapat perhatian yaitu:
  - a. kesenjangan antar wilayah: kesenjangan antar wilayah akan menimbulkan permasalahan tidak hanya dari sisi keadilan tetapi juga memperlemah kinerja pembangunan nasional sebagai sebuah sistem; dan
  - b. struktur keterkaitan antar wilayah: struktur keterkaitan antar wilayah yang tidak terbangun dengan baik, dapat menimbulkan permasalahan terjadinya pengurasan sumber daya (*backwash effect*) dan kebocoran wilayah (*regional leakage*).
- Jika kedua faktor di atas tidak dipenuhi, akan mengakibatkan akumulasi nilai tambah tidak terjadi di dalam wilayah Kalimantan Timur, sehingga aktivitas pembangunan yang dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah itu sendiri;
- Untuk percepatan pembangunan wilayah di luar wilayah Jawa, pengembangan IKN sebagai penggerak ekonomi dapat dilakukan melalui dua strategi dasar yaitu:
  - a. *supply side strategy*: merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan produksi: dan
  - b. *demand side strategy*; merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa akibat meningkatnya pendapatan masyarakat.
- Dari sisi suplai, hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana pembangunan yang dilaksanakan dapat mendorong proses industrialisasi sesuai dengan basis keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Ketersediaan infrastruktur, modal, dan sumber daya manusia menjadi penting. Kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing wilayah harus dapat dijadikan modal untuk membangun infrastruktur, permodalan, dan SDM di tingkat local;
- Dari sisi permintaan, hal terpenting adalah mengembangkan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal serta produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan di tingkat lokal. Hal ini perlu untuk menangkap nilai tambah dari adanya kebutuhan masyarakat akan fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, maupun produk-produk pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya;

- Untuk menjelaskan interaksi ekonomi, digunakan kajian IRIO (*Interregional Input-Output*) menjelaskan interaksi ekonomi antar wilayah, potensi, dan kolaborasi ekonomi, serta peluang suatu wilayah dalam mengatasi ketimpangan melalui penguatan konektivitas. Dalam menentukan potensi wilayah IRIO memberikan informasi berisi sektor kunci / unggulan wilayah serta dampaknya terhadap sektor lain maupun wilayah lain apabila sektor tersebut tumbuh atau menyusut. IRIO juga memberikan informasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru suatu wilayah, efek limpahan (*spill over effect*), ukuran angka pengganda intra maupun inter-regional output dan pendapatan, dan info lainnya;
- Terdapat 16 sektor prioritas (hasil IRIO) menjadi keunggulan Kaltim untuk dikembangkan sebagai pusat pengembangan ekonomi baru. Besarnya nilai tambah 16 sektor prioritas terhadap ekonomi nasional dan peningkatan ekspor nasional ketingkat global. Potensi 16 sektor prioritas untuk dikembangkan dalam 6 cluster ekonomi IKN sebagai penggerak ekonomi nasional. Diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit, baterai listrik, gas dan petrokimia, jasa informasi dan telekomunikasi, jasa kesehatan, pertambangan migas dan panas bumi, dan sektor penyediaan jasa;
- Untuk mendukung IKN sebagai kota penggerak ekonomi, fokus pembangunan IKN pada 5 tahun pertama tidaknya hanya pada KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), tapi perlu didukung pengembangan kawasan industri dan peningkatan pelabuhan laut dan udara;
- Dibutuhkan kebijakan khusus untuk memberikan insentif pada pengembangan 16 sector industri agar IKN memiliki daya tarik untuk menjadi *Superhub* baru untuk menggantikan sebagian peran Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- Dibutuhkan sinergi kebijakan tata ruang antara (Provinsi) IKN dengan Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat sebagian potensi lokasi Kawasan industri dan Pelabuhan lautnya berada di luar Kawasan IKN (Buluminung – Kariangau);
- Tanpa dukungan industri dan pengembangan sektor pariwisata, pembangunan IKN kurang memberikan pengaruh pada perpindahan pusat kegiatan industri & ekonomi dari Pulau Jawa;
- Jika pemindahan IKN hanya memindahkan pusat pemerintahan maka daya ungkitnya terhadap ekonomi kurang signifikan. Sehingga jika pemindahan IKN ingin memiliki daya ungkit yang signifikan maka harus diiringi peningkatan ekonomi. Hal ini penting karena warga negara yang pindah ke IKN adalah kelas menengah ke atas, sehingga membutuhkan suplay ekonomi yang harus disuplai dari seputar wilayah IKN;

- Wilayah-wilayah sekitar IKN harus mampu menyediakan supply ekonomi, sehingga harus digalakkan 16 sektor ekonomi di atas untuk meningkatkan kemakmuran warga sekitarnya; dan
- Bentuk pemerintahan Otorita IKN merupakan hal baru, sehingga harus diperjelas bentuk, kewenangan, fungsi, dan tugasnya.